

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN
ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang persediaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk pegawai sebagai Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemasukan dan pembaharuan data ke dalam Aplikasi Persediaan;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi data persediaan secara berkala;
 - c. menyusun laporan persediaan periode Semester I, II dan Tahunan;
 - d. mendokumentasikan arsip barang persediaan;
 - e. melaksanakan cek fisik barang persediaan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Kerja Eselon II.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Koordinator Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLA
PERSEDIAAN UNIT KERJA
ESELON II TAHUN ANGGARAN
2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
KOORDINATOR PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Hermawan	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Ari Sulindra	Biro Umum dan Keuangan	400.000
3	Sekretaris	Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Intan Dana Lestari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Mia Diana Putri	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Fitriyaningsih	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		8. Setiawan Rahandi Sabri	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		9. Andy Setya Nugraha	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		10. Dede Agustina Muhajirin	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
		11. Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000

		12. Rizki Arif Sudrajat	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
		13. Syukri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
		14. Winny Adlina Pratomo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
		15. Rr Ajeng Kusharyeni P	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
		16. Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
		17. Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
		18. Manshur Riadli	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
		19. Ali Masrochan	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
		20. Hendra Numberi	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
		21. Inamawati Mastuti Dewi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
		22. Bretty Rachayu Budiyanthy	Inspektorat	300.000
		23. Mexi Osmond Soyan	Pusdiklat	300.000

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA